

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pemerintah pusat pada umumnya maupun daerah khususnya, ini sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, karena pada dasarnya partisipasi masyarakat sangatlah vital peranannya untuk meringankan tugas yang diemban pemerintah sebagai pihak utama dalam penyelenggaraan suatu kebijakan di daerah. Banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat ini, menuntut agar pemerintah daerah harus dapat berkolaborasi dengan masyarakat dalam penyelesaiannya, diantara banyaknya permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya yakni permasalahan sampah. Sampah yakni masalah yang sangat vital untuk negeri ini baik di pusat, daerah maupun masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan sampah akan memberikan masalah yang cukup besar pada lingkungan, terutama dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam hal ini pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung sendiri sudah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan yang tertuang dalam pasal 17 ayat (1), dan (2) tentang retribusi juga pasal 18 ayat (2) tentang pembagian tarif retribusi.

Maka dari itu, Pemerintahan Kabupaten Bandung menunjuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung untuk menjalankan peraturan mengelola sampah. Penunjukan ini pun bukan tanpa alasan, karena Dinas Lingkungan Hidup sendiri memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam hal kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pelestarian lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sampah serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah ini menjadi tugas khusus yang harus dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung dengan melakukan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang artinya masyarakat harus dapat mengurangi, memilah dan mendaur ulang sampah yang dihasilkan sehingga nantinya dapat mengurangi jumlah volume sampah yang ada di Kabupaten Bandung, sebagaimana yang tertuang dalam pasal (4) tentang penggolongan sampah berdasarkan sumbernya, pada ayat (1) poin (a) sampah rumah tangga dan ayat (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. kemudian masyarakat pun harus paham betul mengenai pemilahan sampah dengan cara melakukan pembuatan tempat sampah mandiri di tiap masing-masing rumah mereka dengan cara membuat 2 jenis tempat sampah, yakni sampah anorganik

dan sampah organik yang nantinya dapat memudahkan petugas pemerintah dalam pengangkutan sampah menuju TPA.

Tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, itu dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat di daerah Kabupaten Bandung yang terlihat dari kurangnya tempat pembuangan sampah mandiri dan juga masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke beberapa sungai sehingga dapat menimbulkan dampak banjir. Banjir kerap kali terjadi di sejumlah titik di daerah Kabupaten Bandung. Hal ini terjadi karena terus meningkatnya volume sampah, dengan tidak dibarengi pad acara pengelolaan sampah yang sesuai serta partisipasi masyarakat yang masih rendah. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Bandung dituntut agar dapat meningkatkan kinerjanya, serta dapat lebih bersinergi lagi dengan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pengolahan sampah tersebut.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga bukan hanya sekedar dalam pengelolaan sampahnya saja, tetapi ada retribusi wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa pengangkutan serta pengelolaan sampah itu sendiri seperti yang sebagaimana sudah tertuang dalam pasal (2) yang berbunyi: “Ruang lingkup Pengelolaan Sampah dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi, Penggolongan Jenis Sampah, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban, Penyelenggaraan Pengolaan Sampah, Perijinan, Retribusi, Insentif dan Disinsentif, Pembiayaan, Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian, serta Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Sanksi”. Namun, retribusi yang dibayarkan oleh masyarakatpun terlihat

masih kurang sehingga masih sangat diperlukan sosialisasi kembali oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat, untuk lebih jelasnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, maka Dinas Lingkungan Hidup sendiri menunjuk langsung bidang pengelolaan sampah, yang mana terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertujuan agar lebih mendekatkan masyarakat dengan pemerintah dalam hal sosialisasi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik itu partisipasi dalam bentuk retribusi maupun pengelolaan sampah itu sendiri. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sendiri masing-masing terbagi menjadi empat wilayah pelayanan, yakni wilayah Soreang, Baleendah, Ciparay dan Rancaekek, yang mana masing-masing dari (UPT) tersebut membawahi beberapa kecamatan dalam lingkup kerjanya. Dengan kata lain bahwa UPT yang ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup, sudah langsung berhubungan dengan masyarakat daerah Kabupaten Bandung.

Maka dari itu, upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani permasalahan sampah yang sangat kompleks melalui UPT sebagai unit kerjanya, diharapkan agar nantinya dapat langsung bersinergi bersama masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan oleh pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah di Kabupaten Bandung. Partisipasi masyarakat dalam hal ini bukan hanya dalam pengelolaan sampahnya saja, melainkan ada suatu iuran/retribusi yang harus dibayarkan masyarakat kepada unit UPT dalam jasa pengangkutan dan pengelolaan sampah yang diselenggarakan. Adapun

penerimaan retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup dari tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

REKAPITULASI DATA PENDAPATAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2017

NO	TARGET	JUMLAH PENERIMAAN/BULAN	JUMLAH	PERSENTASE	KETERANGAN
1	2,900,000,000.00	JANUARI	18,016,500.00	18,016,500.00	0.62
2	2,900,000,000.00	FEBRUARI	163,506,000.00	181,522,500.00	6.26
3	2,900,000,000.00	MARET	343,556,400.00	525,078,900.00	18.11
4	2,900,000,000.00	APRIL	244,972,000.00	770,509,000.00	26.55
5	2,900,000,000.00	MEI	217,076,000.00	987,126,900.00	34.04
6	2,900,000,000.00	JUNI	143,008,000.00	1,130,134,900.00	38.97
7	2,900,000,000.00	JULI	274,470,500.00	1,404,605,400.00	48.43
8	2,900,000,000.00	AGUSTUS	249,454,000.00	1,654,059,400.00	57.04
9	2,900,000,000.00	SEPTEMBER	211,134,500.00	1,865,193,900.00	64.32
10	2,900,000,000.00	NOVEMBER	215,813,500.00	2,081,007,400.00	71.76
11	2,900,000,000.00	OKTOBER	249,648,000.00	2,330,655,400.00	80.37
12	2,900,000,000.00	DESEMBER	342,646,500.00	2,673,301,900.00	92.18

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah (*data diolah*)

Dari tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa target penyelenggaraan anggaran tahun 2017 dari bulan Januari hingga bulan Desember tidak ada perubahan dengan nominal target anggaran Rp. 2.900.000.000,00.

Tabel 1.2

REKAPITULASI DATA PENDAPATAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018

NO	TARGET	JUMLAH PENERIMAAN/BULAN	JUMLAH	PERSENTASE	KETERANGAN
1	3,400,000,000.00	JANUARI	120,871,500.00	120,871,500.00	3.56
2	3,400,000,000.00	FEBRUARI	185,623,000.00	306,494,500.00	9.01
3	3,400,000,000.00	MARET	232,092,500.00	538,587,000.00	15.84
4	3,400,000,000.00	APRIL	251,286,000.00	789,873,000.00	27.24
5	3,400,000,000.00	MEI	284,440,000.00	1,074,313,000.00	37.05
6	3,400,000,000.00	JUNI	235,676,500.00	1,309,989,500.00	45.17
7	3,400,000,000.00	JULI	367,198,000.00	1,677,187,500.00	57.83
8	3,400,000,000.00	AGUSTUS	338,572,000.00	2,015,759,500.00	69.51
9	3,400,000,000.00	SEPTEMBER	319,748,000.00	2,335,507,500.00	68.69
10	3,400,000,000.00	NOVEMBER	365,538,500.00	2,701,046,000.00	79.44
11	3,400,000,000.00	OKTOBER	327,228,000.00	3,028,274,000.00	89.07
12	3,400,000,000.00	DESEMBER	488,974,750.00	3,517,248,750.00	103.45

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah (*data diolah*)

Kemudian dari tabel 1.2, terlihat target realisasi anggaran di bulan Januari sampai dengan Desember 2018 mengalami peningkatan target realisasi anggaran dibandingkan tahun sebelumnya dengan nominal Rp. 3.400.000.000,00. Namun tetap sama dengan tahun sebelumnya tidak ada perubahan target di tahun 2018 dari bulan Januari-Desember.

Tabel 1.3

REKAPITULASI DATA PENDAPATAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2019

NO	TARGET	JUMLAH PENERIMAAN/BULAN	JUMLAH	PERSENTASE	KETERANGAN
1	3,400,000,000.00	JANUARI	20,079,500.00	200,793,500.00	5.91
2	3,400,000,000.00	FEBRUARI	232,247,500.00	433,041,000.00	12.74
3	3,400,000,000.00	MARET	273,422,000.00	706,463,000.00	20.78
4	3,400,000,000.00	APRIL	272,652,000.00	979,115,000.00	28.80
5	3,400,000,000.00	MEI	261,903,000.00	1,241,018,000.00	36.50
6	3,400,000,000.00	JUNI	318,789,500.00	1,559,807,500.00	45.88
7	4,420,000,000.00	JULI	381,841,000.00	1,941,648,500.00	43.93
8	4,420,000,000.00	AGUSTUS	284,780,500.00	2,226,429,000.00	50.37
9	4,420,000,000.00	SEPTEMBER	356,646,500.00	2,583,075,500.00	58.44
10	4,420,000,000.00	NOVEMBER	365,828,000.00	2,948,903,500.00	66.72
11	4,420,000,000.00	OKTOBER	367,245,000.00	3,316,148,500.00	75.03
12	4,420,000,000.00	DESEMBER	460,585,000.00	3,776,733,500.00	85.45

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah (*data diolah*)

Sedangkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa adanya perubahan target ditahun yang sama , terlihat dari target realisasi anggaran tahun 2019 dari bulan Januari-Juni dengan nominal Rp. 3.400.000.000,00. Sedangkan bulan Juli-Desember mengalami kenaikan target realiasaisai anggaran dengan nominal Rp. 4.420.000.000,00.

Diketahui bahwa iuran/retribusi masyarakat dalam hal ini terlihat fluktuaktif, sehingga korelasi tingkat fluktuakif dari data tersebut memberikan gambaran bahwa tingkat partisipasi masyarakat cenderung tidak konsisten dalam pelaksanaannya, hal ini sangatlah berdampak terhadap anggaran DLH

dari awal tahun hingga pertengahan tahun yang selalu tidak mencapai terhadap target yang diharapkan, sehingga sangatlah berdampak besar terhadap kurangnya fasilitas pendukung dalam hal pengelolaan sampah yang diperlukan oleh masyarakat maupun pemerintah dikarenakan kurangnya anggaran, yang pada akhirnya dapat menghambat kinerja pemerintah dalam pengelolaan sampah.

Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam hal ini bukan hanya dalam pengelolaan sampahnya saja, melainkan ada suatu iuran/retribusi yang harus dibayarkan masyarakat kepada DLH melalui Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) sebagai pihak pelaksana penarikan iuran/retribusi terhadap masyarakat, yang bertujuan untuk pembayaran jasa pengangkutan dan pengelolaan sampah yang diselenggarakan .

Dari tiga tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat rendah, terlihat pada target realisasi anggaran pemerintah daerah yang di bebaskan pada Dinas Lingkungan Hidup selama periodisasi anggaran 2017-2019 selalu tidak tercapai dari awal tahun hingga pertengahan tahun.

Dengan oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menjalankan penelitian lebih dalam mengenai partisipasi masyarakat melalui judul skripsi **“Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terlihat dari bagaimana kurangnya kesadaran masyarakat dalam iuran sampah.
2. Masih banyaknya hambatan yang dilalui oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah serta kurangnya dorongan masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
3. Selalu tidak tercapainya target realisasi anggaran dari awal tahun hingga pertengahan tahun selama tiga tahun berturut-turut

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemantauan evaluasi dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung?
5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung?
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemantauan evaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam pengelolaan sampah.
5. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

E. Manfaat Peneliiian

1. Secara Akademis

Penelitian tersebut semoga bisa memberikan suatu kontribusi pemikiran untuk ilmu adminisrasi publik khususnya keuangan publik serta ilmu pengetahuan dan juga bisa menjadi suatu masukan dan bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya tentang “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung”.

2. Secara Praktis

- a. Untuk Pemerintah (Daerah, Kecamatan, Kelurahan) Kabupaten Bandung

Penelitian inipun ditujukan untuk mengetahui sudah sampai manakah peningkatan partisipasi masyarakat di Kabupaten Bandung dan juga sebagai bahan pertimbangan, masukan serta evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan baik itu pembangunan, anggaran juga pemberdayaan masyarakat untuk ke depannya.

b. Untuk Penulis

Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi penulis berkaitan penelitian yang berhubungan dengan Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Keuangan Publik.

c. Untuk Pihak-pihak Lain

Penelitian ini juga semoga bisa menjadi tambahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis sehingga dapat menjadi bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian lainnya yang telah ada sebelumnya.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penjelasan permasalahan diatas, terdapat beberapa kerangka pemikiran yang nantinya akan memudahkan pembaca maupun penulis untuk mengetahui target yang akan di gapai dari penelitian ini. Berkaitan dengan Peningkatan Partisipasi pada Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, didapati beberapa teori yang berkaitan yang diantaranya adalah teori Administrasi Publik, Keuangan sektor Publik, dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

Menurut Herbert A. Simon dalam Afifudin (2012:4) administrasi merupakan aktivitas kelompok kerjasama dalam menggapai target bersama.

Menurut Sondang P. Siagian dalam Akadun (2009:37) administrasi merupakan semua proses kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang dilandaskan pada rasionalitas tertentu dalam menggapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Handari Nawawi dalam Syafiie (2014:5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Definisi para ahli mengenai administrasi ini menurut penulis memiliki pengertian yang sama, sehingga setidaknya meliputi:

1. Untuk mencapai tujuan bersama
2. Kerja sama
3. Banyak orang

Adapun pengertian publik tidak jauh berbeda dengan masa. Publik bisa dijelaskan sebagai orang-orang yang datang menonton atau mengunjungi. Menurut Herbert Blumer dalam Mukarom (2016:36) memaparkan ciri-ciri publik yakni:

1. Terlibat pada diskusi terkait isu tersebut;
2. Mempunyai perbedaan opini tentang cara mengatur isu;
3. Dihadapkan atau dikonfrontasikan pada suatu isu.

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014:3) “menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan proses dimana sumber daya serta anggota publik diorganisiir serta dikoordinasikan untuk memformmulasikan, mengimplemantasikan, dan mengelola (manage) sebuah keputusan pada ketentuan publik”.

Menurut Dwight Waldo dalam Syafiie (2014:33) menjelaskan bahwa administrasi publik ialah organisasi serta pengaturan dari individu serta fasilitasnya dalam mewujudkan target pemerintah.

Pengelolaan memiliki arti sebagai suatu proses atau cara untuk melakukan kegiatan tertentu dengan bantuan sumber daya manusia di dalamnya, maka terjadi suatu proses perumusan kebijakan dan tujuan organisasi, serta terlibatnya suatu proses pengawasan pada seluruh aspek yang terlibat di dalamnya.

Pengelolaan bahkan dapat dikatakan sebagai sebuah pengelolaan karena memiliki bagian dalam mengendalikan serta dampak lebih untuk semua sumber daya yang dikategorikan sebagai sebuah *planning* yang diperlukan dalam menbereskan sebuah target tertentu. Pengelolaan memiliki arti yang sama dengan manajemen, maka dari itu sangat erat kaitannya dengan suatu perencanaan, penggerakkan, pengorganisasian serta pengawasan dalam memberi petunjuk dalam memperoleh hasil dengan efektif agar tergapainya sebuah target. (Irawan, 1997: 5).

Dilihat dari penjelasan di atas, bisa dijelaskan bahwa mengelola pada intinya yakni seni/proses untuk terselesainya sesuatu yang berkaitan pada tercapainya target. Menurut Kurniawan & Erni (2005:6) Dalam menyelesaikan hal tersebut, ada tiga faktor yang berkaitan :

1. Adanya proses menggunakan sumber daya didalam organisasi, baik dari SDM nya, maupun faktor produksi yang ada didalamnya.
2. Adanya proses yang *step by step* dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaannya, hingga dalam mengendalikan serta mengawasinya.
3. Adanya sebuah seni saat membereskan tugas.

Menurut Ermaya Suradinata dalam bukunya Nawawi Zaidan (2013:14) *goal* pengelolaan yakni keahlian yang berkaitan dengan proses dalam menggapai target tertentu dengan jalan memakai SDM serta sumber lainnya yang ada pada organisasi dengan teknik yang efisien.

Pada sebuah permasalahan yang ada dimasyarakat jelasnya ada jalan keluar untuk menanganinya. Oleh sebab itu, persoalan itu bisa ditangani jika mengelolanya secara baik dan benar. Menurut Soewarno (1997:9) Target dalam mengelolanya akan tergapai jika tahap dalam implementasi mengelolanya dilaksanakan dengan efektif. Tahap dalam implementasi pengelolaan berlandaskan sebuah target yakni:

1. Menentukan strategi.
2. Menentukan sarana dan batasan tanggungjawab.

3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
5. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi.
6. Menentukan ukuran untuk menilai.
7. Mengadakan pertemuan.
8. Pelaksanaan.
9. Mengadakan Penilaian.
10. Mengadakan review secara berkala.
11. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Menurut Adisasmita (2006:38) partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan serta pelibatan seluruh masyarakat untuk pembangunan, meliputi aktivitas untuk melaksanakan sebuah kegiatan.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat atas hal-hal yang berada di wilayah tersebut, seperti yang disebutkan oleh Aprillia Theresia dkk (2015:197) “Pembangunan Berbasis Masyarakat” partisipasi adalah suatu jenis komunikasi yang berkaitan dengan dampak, tanggung jawab, serta kewenangan. Keikutsertaan tersebut sebagai salah satu bagian yang terjadi akibat interaksi social antar individu yang bersangkutan dengan masyarakat lain dikatakan oleh Raharjo (1983:196).

Isbandi dalam Rivai mengatakan Partisipasi masyarakat (2013: 20) adalah proses berkontribusinya masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan serta

kelebihan yang dimiliki, pemilihan serta pengambilan keputusan berkaitan alternatif jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan, implementasi pada upaya penanganan persoalan serta keterlibatan pada tahap evaluasi persoalan itu..

Penelitian ini merujuk pada teori partisipasi masyarakat menurut Yadav dalam Aprillia Theresia dkk (2015:198), yang terdiri dari empat macam partisipasi masyarakat yaitu :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi semacam ini diperlukan forum untuk masyarakat agar ikut serta melakukan partisipasi secara langsung di dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan program-program pembangunan.

2. Partisipasi untuk menjalankan aktivitas

Maksudnya yaitu selalu didefinisikan sebuah partisipasi masyarakat yang kurang mampu secara sukarela untuk memberikan kemampuannya dalam pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat pada menjalankan pembangunan didefinisikan sebagai pemeratan berupa sumbangan masyarakat dalam bentuk uang tunai, tenaga kerja yang sesuai dengan pemanfaatan yang akan diperoleh masing-masing dari warga masyarakat.

3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi ini sangat dibutuhkan. Targetnya agar tercapai apa yang diinginkan serta diperlukan sebagai umpan balik dari persoalan atau masalah yang timbul saat menjalankan pembangunan. Oleh sebab itu partisipasi

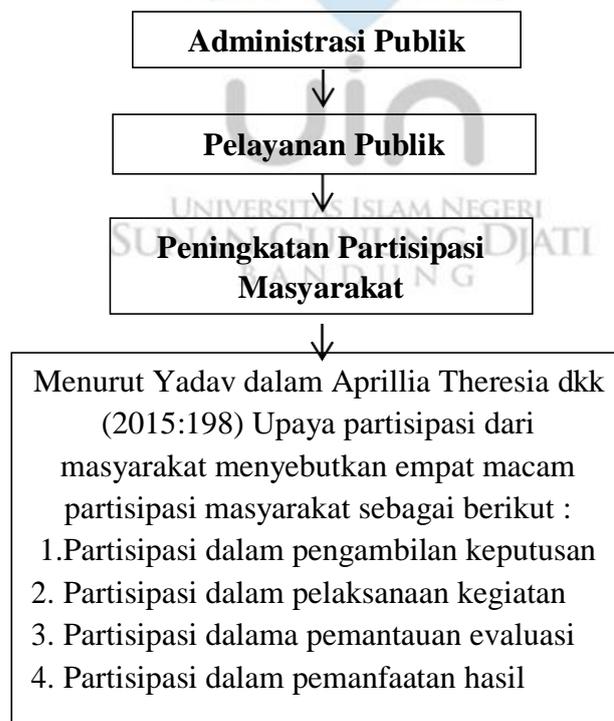
masyarakat sangatlah diperlukan dalam mengumpulkan informasi mengenai perkembangan kegiatan.

4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil sayangnya kurang perhatian dari administrator atau pemerintah dan masyarakat pun sering kali menjadi sasaran yang tidak dapat mengartikan manfaat setiap program pembangunan. Seringkali dalam pelaksanaan pembangunan sering dianggap pemanfaatannya pasti dirasakan oleh masyarakat. Kenyataannya, justru masyarakat tidak kurang paham manfaat dari hasil pogram pembangunan secara langsung.

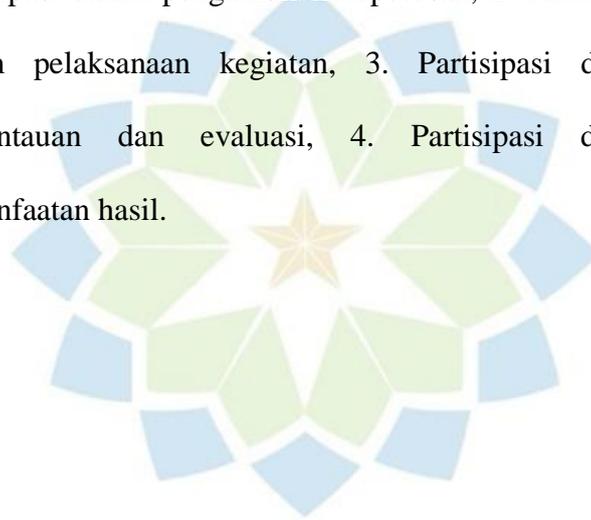
Berlandaskan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, pada penelitian ini bisa dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Proposisi

Berdasarkan landasan pemikiran diatas, *“Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung”* akan baik jika berdasarkan 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, 3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, 4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG